

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, PT. Alumni, Bandung.
- _____, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Gadjong, Agussalim Andi, 2007, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gie, The Liang, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1994, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid II, Liberty, Yogyakarta.
- Hadi, M. , 1972, *Administrasi Keuangan RI*, Institut Ilmu Keuangan, Jakarta.
- HR, Ridwan. , 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Husein, A., 1983, *Pokok-Pokok Anggaran Negara*, Eko Jaya, Jakarta.

- Indrati S, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Isjwara, Fred, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung.
- Jaweng, Robert Endi, 2004, *Pasang-Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun di Indonesia*, ILD dan Yayasan Tifa, Jakarta.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung.
- Kaloh, J. , 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kirman, 2005, *Pegangan Memahami Desentralisasi dan Beberapa Pengertian Tentang Desentralisasi*, Pondok Edukasi, Yogyakarta.
- Kusnardi dan Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pertama, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1998, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta.
- _____, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Karawang.
- _____, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marpaung, Andy Ramses, 2009, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, MIPI, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- MPR RI, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat MPR RI, Jakarta.

- _____, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekjen MPR RI, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reid, Anthony J.S., 1996, *Revolusi Nasional Indonesia*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualitasnya*, Penerbit Yapemdo, Bandung.
- Roem, Mohammad, dkk., 2011, *Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sarundajang, 2003, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Situmorang, Victor M., 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jumimetri*, Balai Aksara, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2011, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Grassindo, Jakarta.
- Surjomiharjo, Abdurrachman, 2008, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe (Sejarah Sosial 1880-1930)*, Komunitas Bambu, Jakarta.

Suwarno, P.J., 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*, Kanisius, Yogyakarta.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 3)

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 56)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 827).

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 9) tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 15).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2777).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339).

III. Tesis dan Disertasi

Hoessein, Bhenyamin, 1993, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Indonesia: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

Jaweng, Robertus Na Endi, 2012, *Analisis Kewenangan Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara Dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia.

Situmorang, Sodjuangon, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

IV. Jurnal dan Makalah

Asshiddiqie, Jimly, "Mempertimbangkan Perubahan ke Arah Bentuk Negara Persatuan Republik Indonesia". Makalah disampaikan pada Simposium Hukum 2000 ILUNI-FH, "Masalah Keadilan Sosial dan Disintegrasi Bangsa," Reog Room, Hotel Indonesia, 4 Maret 2000.

Jaweng, Robert Endi, "Keistimewaan Yogyakarta: Babak Baru yang Menyisakan Sejumlah Catatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 42 Tahun 2013.

Marihandono, Djoko, "Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa", *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 12, Juli 2008.

Nurbaningsih, Enny, "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, Februari 2011.

Ratnawati, Tri, “Antara Otonomi Sultan dan Kepatuhan pada Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *Jurnal Governance*, Vol. 2 No. 1, November 2011.

V. Internet

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, diakses dari http://portal.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48:sejarah&catid=38:profil-pemerintah&Itemid=210, pada tanggal 23 Oktober 2014.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Sejarah Keistimewaan Yogyakarta*, diakses dari <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/sejarah-keistimewaan-yogyakarta>, pada tanggal 28 Oktober 2014.